

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat yang keberadaannya tidak terlepas dari lingkungan dan masyarakat karena perusahaan tidak bisa mengembangkan diri sendiri dengan tidak memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham atau pihak-pihak kepentingan di perusahaan tersebut. Tujuan didirikan perusahaan yaitu untuk mencari profit agar dalam pengembangan kegiatan ekonomi perusahaan menjadi lebih profitable karena perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi (Muryafiru, 2019).

Perkembangan dunia bisnis saat ini berkembang pesat yang ditandai salah satunya dengan adanya perusahaan dari berbagai sektor sehingga menyebabkan tingkat persaingan antar pelaku bisnis sangat ketat. Persaingan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas bisnis yang lebih berorientasi pada keuntungan tanpa mepedulikan dampak negatif yang muncul seperti kerusakan lingkungan sehingga memicu adanya paradigma baru bahwa perusahaan dalam operasionalnya tidak hanya mencari keuntungan saja melainkan mepedulikan keamanan bagi lingkungan masyarakat agar perusahaan lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dampak bisnis perusahaan (Muryafiru, 2019).

Perusahaan perlu menyajikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam sebuah laporan yang biasa di sebut dengan *sustainable reporting*. *Sustainable reporting* merupakan laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan tujuan untuk menarik para stakeholder terhadap perusahaan. Saat ini pandangan tingkat keberhasilan perusahaan menjadi lebih luas, tidak hanya di lihat berdasarkan sebatas aspek ekonomi saja melainkan sekarang para investor juga

memprioritaskan perusahaan yang bertanggung jawab dalam aspek sosial dan lingkungan sesuai dengan konsep *sustainable reporting* yang dituangkan dalam *triple bottom line* (Muryafiru., 2019).

Triple bottom line yang terdiri dari *profit* (keuntungan atau ekonomi), *people* (sosial), dan *planet* (lingkungan) digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan terhadap parameter ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan selama periode waktu tertentu. Perusahaan yang menerapkan *triple bottom line* akan memiliki dampak positif pada dunia bisnis, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja keuangan. Aspek *profit* dalam menjalankan perusahaan tidak hanya mencari keuntungan saja. Aspek *people* mengacu pada kesejahteraan kepentingan perusahaan, tenaga kerja, dan pemangku kepentingan lainnya yang saling bergantung dalam menjalankan perusahaan. Aspek *planet* mengacu pada pelaporan keberlanjutan sehingga berpotensi meminimalkan dampak lingkungan (Fuadah et al., 2018).

Trippel bottom line terdapat dalam *sustainable reporting* yang dikeluarkan oleh standar *Global Reporting Intistive* (GRI) yang merupakan standar pelaporan keberlanjutan (*Sustainable Reporting*) untuk melaporkan berbagai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dan merupakan kerangka yang paling banyak digunakan untuk pelaporan keberlanjutan. Tujuan standar *Global Reporting Intistive* (GRI) yaitu untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam pelaporan keberlanjutan, sehingga perusahaan yang menerapkan standar *Global Reporting Intistive* (GRI) ini berpotensi menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada pemangku kepentingan, serta mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan (Afifah et al., 2022).

Pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan berdasarkan standar *Global Reporting Intistive* (GRI) berpotensi memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif terhadap Pembangunan keberlanjutan. Penerbitan laporan keberlanjutan di Indonesia saat ini merujuk pada strandar pengungkapan yang ada dalam *Global Reporting Intistive* (GRI). Menurut studi terdahulu mengungkapkan bahwa *sustainable reporting* sebagai pelaporan yang

dilakukan perusahaan secara sukarela, yang melaporkan sumbangsih perusahaan kepada masyarakat dilihat dari 3 aspek yaitu, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan keberlanjutan di susun untuk memberikan gambaran transparan terkait dengan operasional perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari laporan keberlanjutan yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat umum (Afifah et al., 2022).

Studi terdahulu Liana (2019) *sustainable reporting* adalah laporan yang ditebitkan oleh suatu perusahaan dalam mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial agar perusahaan berpotensi mengukur, memahami, dan upaya akuntabilitas dari kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan Pembangunan keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan baik pihak internal atau eksternal, dimana laporan ini sebagai bentuk penyampaian informasi terhadap pemangku kepentingan. Tujuannya diperlakukan laporan berkelanjutan (*sustainable reporting*) agar pemegang saham berpotensi mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sekitar.

Sustainable reporting menjadi tren dan kebutuhan bagi perusahaan progresif untuk menginformasikan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perusahaan mengungkapkan *sustainable reporting* untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan kepada *stakeholder* sehingga berpotensi meningkatkan citra perusahaan serta membantu perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal perusahaan, sehingga ketika citra perusahaan baik, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang bermanfaat bagi keberlanjutan perusahaan (Liana, 2019).

Perusahaan BUMN PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tengah jadi perbincangan publik. Karena ulah beberapa oknumnya, BUMN farmasi tersandung penggunaan alat rapid test antigen bekas kepada masyarakat, terutama para calon penumpang pesawat di Bandara Kualanamu, Deli Serdang. Pelayanan antigen tersebut dilakukan oleh karyawan laboratorium kimia farma yang berlokasi di jalan R.A Kartini nomor 1 Kelurahan Madras Hulu,

Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Mereka membersihkan alat antigen bekas pakai, kemudian dikemas ulang untuk kemudian dipakai Kembali kepada para calon penumpang pesawat. Mengutip laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kimia Farma (Persero) Tbk meraup laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk sebesar 17,63 miliar pada 2020. Sementara tahun sebelumnya atau di 2019, Kimia Farma mengalami kerugian sebesar 12,72 miliar. Pada fenomena ini dapat disimpulkan bahwa oknum yang merupakan manajer PT Kimia Farma sangat merugikan perusahaan dan bertentangan dengan *Standard Operating Procedur* (SOP) perusahaan serta mencoba mencari keuntungan dari tes antigen bekas pakai dengan tidak mengutamakan *sustainable reporting* pada aspek sosial dikarenakan oknum tersebut memberikan alat rapid test bekas kepada Masyarakat sedangkan alat tersebut belum tentu bersih higienis dan itu merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan membuat keresahan di lingkungan sekitar (www.kompas, 2021).

Pengungkapan *sustainable reporting* juga perlu di dukung dengan perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), sebagaimana prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) seperti *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), dan *responsibility* (tanggung jawab) yang menjadi struktur dan sistem internal serta budaya dan perilaku perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bermanfaat untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk para *shareholders* dan *stakeholders*. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) akan efektif dan efisien apabila terdapat kepatuhan yang terlebih diterapkan oleh jajaran manajemen kemudian diikuti oleh segenap karyawan (Surya & Yustiavandana, 2006).

Pengungkapan *Sustainable Reporting* membutuhkan partisipasi dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama perusahaan. Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip utama dari *Good Corporate Governance* (GCG) untuk melindungi para investor. Prinsip transparansi berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, karena segala informasi material yang telah diberikan dapat diolah sedemikian rupa sehingga

didapatkan bahan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah *agency* problem dengan direksi dan pemegang saham (Surya & Yustiavandana, 2006).

Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Prinsip keadilan sangat berkaitan dengan prinsip akuntabilitas yang berfokus pada pemegang saham, dimana prinsip ini memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan memfokuskan pada adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara setiap pemegang saham (Surya & Yustiavandana, 2006).

Surya & Yustiavandana (2006) Komite audit merupakan organ tambahan yang diperlukan dalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Komite audit memiliki tanggung jawab mengawasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan, dengan tujuan untuk mencegah adanya potensi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh manajemen perusahaan, sehingga dengan adanya komite audit perusahaan didorong untuk memberikan laporan yang terintegrasi, termasuk laporan berkelanjutan.

Komite audit dalam pengawasan laporan berkelanjutan memastikan bahwa laporan tersebut disusun dengan akurat, transparan, dan sejalan dengan standar yang berlaku, serta menilai risiko yang terkait dengan isu keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial. Komite audit memastikan bahwa laporan berkelanjutan bukan hanya formalitas, tetapi komitmen organisasi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan pengendalian internal serta pengawasan terhadap dewan direksi dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan transparansi berupa *sustainable reporting*. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, karena independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite

audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya & Yustiavandana, 2006).

Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris guna mencapai tujuan komite audit. Kebutuhan komite audit disebabkan oleh belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Komite audit memiliki tanggung jawab pada tiga bidang, yang pertama laporan keuangan (*Financial Reporting*) dimana komite audit bertanggung jawab terhadap laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan yang di buat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka Panjang. Kedua, Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) sebagaimana tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan ialah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta etika melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Ketiga, ialah Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*), sebagaimana komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal (Surya & Yustiavandana, 2006).

Studi terdahulu Purbandari & Suryani (2021) mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *sustainable reporting*, sebagaimana komite audit mendorong pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terpenuhi, salah satu prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ialah transparansi, dimana perusahaan wajib untuk bertindak secara transparan atau terbuka atas aktivitas bisnis yang dilakukan yang kemudian melakukan pelaporan.

Studi terdahulu Sofa & Respati (2020) mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *sustainable reporting*, komite audit berfungsi

memperkuat pengawasan komisaris terhadap perusahaan yang memiliki tugas untuk menindaklanjuti temuan auditor internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, namun komite audit dalam menjalankan tugasnya berfokus menyelesaikan temuan-temuan audit serta menelaah pengaduan dalam perusahaan dan tidak berfokus pada luas pengungkapan *sustainable reporting*.

Komisaris Independen mengindikasikan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen maka harus ada sistem yang baik yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) yang mewajibkan keberadaan komisaris independen. Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris pada umumnya. Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris independen merupakan komisaris yang menjadi bagian dari anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen diharapkan berpotensi menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan para pihak, yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik. Konsep independen pada pemegang saham independen ini bila dipakai dalam komisaris independen, maka seharusnya definisi komisaris independen merupakan pihak yang tidak mewakili kepentingan pihak manapun kecuali perusahaan dan kebaikan bagi perusahaan itu sendiri. Namun, gambaran yang timbul dari definisi komisaris independen ialah komisaris wakil pemegang saham minoritas, sehingga disimpulkan bahwa komisaris independen hanya mewakili kepentingan pemegang saham minoritas saja, dengan demikian komisaris independen bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (Surya & Yustiavandana, 2006).

Komisaris independen menjadi salah satu komponen penting yang mempengaruhi sustainable reporting dalam *Good Corporate Governance*

(GCG), dimana apabila jumlah komisaris independen semakin besar maka berpotensi memberikan kekuatan kepada dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas *sustainable reporting* perusahaan. Komisaris independen berpotensi memberikan perspektif yang objektif yang sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Komisaris independen merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab mengawasi dan memastikan perusahaan telah dikelola dengan baik oleh manajemen. Oleh karena itu peran komisaris independen sangat penting untuk mengungkapkan informasi baik dalam laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (Putri & Surifah, 2023).

Studi terdahulu Mujiani & Jayanti (2021) mengungkapkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *sustainable reporting*. Komisaris independen mampu melakukan pengawasan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan *sustainable reporting*.

Yanthi et al., (2021) mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *sustainable reporting*. Komisaris independen ialah untuk mewakili pemegang saham dan pihak yang ditunjuk merujuk pada pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas serta kepentingan perusahaan. Namun, komisaris independen tidak mempengaruhi keputusan manajemen dalam pengungkapan *sustainable reporting*.

Dewan direksi memiliki peran penting dalam mencapai *Good Corporate Governance* (GCG), dimana dewan direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pemimpin perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Dewan direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk mengendalikan pelaksanaan roda perusahaan yang sesuai dengan kebijakan strategis sebagai penjamin terwujudnya prinsip-prinsip *accountability* dan *fairness* dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan direksi juga bertanggung jawab untuk membuat keputusan

terkait dengan operasional dan ekonomi yang berpotensi mempengaruhi jangka panjang perusahaan (Widianto, 2011).

Dewan komisaris berfungsi sebagai komponen fungsional perusahaan, mengawasi, memberi nasihat, dan membantu dewan direksi untuk memastikan bisnis sejalan dengan entitas yang baik. Prosedur pemantauan yang lebih ketat oleh dewan komisaris berpotensi meningkatkan kualitas pengungkapan *sustainable reporting*. Perusahaan dapat mempublikasikan informasi lingkungan agar dapat memproyeksi citra kepedulian terhadap lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Dewan komisaris juga dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggungjawab untuk memantau tindakan manajemen. Meningkatnya jumlah dewan komisaris, maka proses pemantauan akan semakin baik, sehingga pengungkapan *sustainable reporting* menjadi lebih luas (Retnoningsih, Fikri, et al., 2024).

Menurut studi terdahulu Nurrahman & Sudarno (2013), Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan seperti bank, dana pensiun, asuransi, dan kepemilikan institusional lainnya. Kepemilikan institusional berpotensi mempengaruhi pengungkapan *sustainable reporting* karena para investor bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham.

Kepemilikan manajerial ialah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer, sebagaimana jika kepemilikan saham besar maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial berpotensi mengurangi konflik kepentingan manajeri dalam melakukan manipulasi dengan menjajarkan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer (Yanthi et al., 2021).

Sebagaimana telah diuraikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *Good Corporate Governance* (GCG) ialah komite audit, komisaris independen, dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Dari uraian tersebut, penulis menggunakan komite audit sebagai variabel X1 dan komisaris independen sebagai variabel X2 untuk mewakili dalam pengukuran variabel *Good Corporate Governance* (GCG).

Female directors (direksi Perempuan) ialah keberagaman gender dalam direksi yang juga menjadi komponen penting untuk meningkatkan kinerja manajemen. Gender Perempuan pada dewan direksi cenderung memenuhi kebutuhan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan kepentingan *stakeholder* dan dapat menumbuhkan pengungkapan *sustainable reporting*. Perempuan memiliki sifat khusus seperti lembut, suportif, serta empati yang mendukung serta meningkatkan kegiatan terkait kesejahteraan lingkungan. Adanya keberagaman gender juga berpotensi mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan (Retnoningsih, Wijayanti, et al., 2024).

Studi terdahulu Justin & Hadiprajitno (2019) mengungkapkan bahwa *female directors* berpengaruh terhadap *sustainable reporting*, sebagaimana gender dalam konteks dewan direksi perusahaan didominasi oleh pria, namun jika perempuan dianggap sebagai anggota dewan yang tidak setara dengan pria maka kesempatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan akan lebih sedikit. Peningkatan Perempuan pada perusahaan juga berpotensi menciptakan komunikasi yang baik. Jumlah direksi perempuan juga dapat membuat perspektif pemangku kepentingan.

Studi terdahulu Retnoningsih, Wijayanti, et al., (2024) mengungkapkan bahwa *female directors* tidak berpengaruh terhadap *sustainable reporting*. Pengungkapan *sustainable reporting* tidak bergantung pada gender perempuan, dimana jumlah dewan direksi perempuan masih sedikit karena sistem patrilineal di Indonesia dalam pengambilan keputusan khususnya dalam penungkapan *sustainable reporting*.

Sustainable reporting atau laporan berkelanjutan juga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode yang bersangkutan. Perusahaan memerlukan keuangan yang bagus agar dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial atau menciptakan tingkat keuntungan yang kemudian dijadikan pertimbangan perusahaan dalam merancang program sosial dan pelestarian lingkungan yang diungkapkan dalam *sustainable reporting*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka menandakan perusahaan

memiliki keuangan yang bagus sehingga pengungkapan *sustainable reporting* akan semakin luas dan besar karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan agar mendapatkan kepercayaan dari *stakeholder* atas kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan *stakeholder* (Gunawan & Sjarief, 2022).

Menurut studi terdahulu Mujiani & Jayanti (2021) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *sustainable reporting*, sebagaimana Ketika profitabilitas perusahaan meningkat maka manajemen akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan *sustainable reporting*.

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *sustainable reporting*, karena menurut penelitiannya pada sektor energi dan bahan material memiliki *image* yang kurang baik, dimana kegiatan operasionalnya dapat merusak lingkungan sehingga perusahaan akan menjaga citra perusahaan dengan melakukan pengungkapan *sustainable reporting*. Tinggi rendahnya profitabilitas tidak berpengaruh pada pengungkapan *sustainable reporting*, sehingga disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah tetap dapat berperan aktif untuk aktivitas sosial dan lingkungan (Gunawan & Sjarief, 2022).

Selain profitabilitas, *lverage* juga mempengaruhi pengungkapan *sustainable reporting* karena *lverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Semakin tinggi tingkat *rasio lverage* artinya perusahaan memiliki risiko yang tinggi dalam melunasi utang sehingga dapat membuat reputasi perusahaan menjadi buruk. *Lverage* juga diartikan sebagai penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap bertujuan untuk meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat *lverage* yang tinggi membuat manajemen berupaya untuk menurunkan risiko dengan tidak melakukan pengungkapan *sustainable reporting* untuk mengurangi biaya, melainkan perusahaan cenderung mengutamakan pelunasan

peminjaman dibandingkan melakukan *sustainable reporting* yang memiliki anggaran besar (Nioko & Hendrani, 2024).

Leverage berpengaruh terhadap *sustainable reporting*, sebagaimana semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka pengungkapan *sustainable reporting* akan semakin tinggi, karena dengan tingkat *leverage* yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan terhadap utang yang membuat perusahaan meningkatkan pengungkapan *sustainable reporting* untuk menutupi masalah keuangan, sehingga citra perusahaan tetap baik di mata para *stakeholder* (Gunawan & Sjarief, 2022).

Leverage tidak berpengaruh terhadap *sustainable reporting*, dimana tingkat *leverage* yang tinggi akan menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk melaporkan profitabilitasnya tetap tinggi untuk meyakinkan para kreditor bahwa perusahaan tetap sehat. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk menekan biaya yang dikeluarkan untuk melaporkan laba yang tinggi, salah satu biaya yang dikurangi ialah biaya untuk mengungkapkan *sustainable reporting* (Putri & Surifah, 2023).

Ringkasan *research gap* pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, *Female Directors*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Sustainable Reporting*.

Table 1.1
Research Gap

Research Gap	Hasil Penelitian	Peneliti
Terdapat perbedaan pengaruh Komite Audit terhadap <i>Sustainable Reporting</i>	Berpengaruh	Yeni purbandari, ratna Suryani (2021)
	Tidak berpengaruh	Faizah Naila Sofa, Novita Wening Tyas Respati (2020)
Terdapat perbedaan pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Sustainable Reporting</i>	Berpengaruh	Sari Mujiani, Jayanti (2021)
	Tidak berpengaruh	Ni kadekdharma yanthi, I gede cahyadi putra, I Ketut sunarwijaya (2021)

Terdapat perbedaan penelitian pengaruh <i>Female Directors</i> terhadap <i>Sustainable Reporting</i>	Berpengaruh	Patrick Justin, Paulus Th Basuki Hadiprajitno (2019)
	Tidak berpengaruh	Sri Retnoningsih, Sukma Wijayanti, Heni Risnawati (2024)
Terdapat perbedaan penelitian pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Sustainable Reporting</i>	Berpengaruh	Sari Mujiani, Jayanti (2021)
	Tidak Berpengaruh	Veren Gunawan, Julianti Sjarief (2022)
Terdapat perbedaan penelitian pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Sustainable Reporting</i>	Berpengaruh	Veren Gunawan, Julianti Sjarief (2022)
	Tidak berpengaruh	Andi diana putri, surifah (2023)

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025)

Merujuk pada uraian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait dengan *sustainable reporting* yang merujuk pada beberapa faktor dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Sustainability Committee, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Sustainable Reporting”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *Sustainable Reporting*?
2. Apakah *Female Directors* berpengaruh terhadap *sustainable reporting*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *sustainable reporting*?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *sustainable reporting*?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Sustainable Reporting*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Female Directors* terhadap *Sustainable Reporting*

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *Sustainable Reporting*
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Sustainable Reporting*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi penting untuk membuat laporan berkelanjutan (*sustainable reporting*) terhadap perusahaan agar tetap meningkatkan laporan keuangannya, dapat digunakan sebagai sumber ilmu dan menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *sustainable reporting*, serta sebagai sumber referensi bagi peneliti di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi akademis dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya auditing, serta mengembangkan pengetahuan dan sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.
- b. Bagi perusahaan dapat memberikan solusi dan keputusan yang baik atas masalah yang terjadi oleh perusahaan yang memiliki dampak negatif atas laporan berkelanjutan serta dapat menerbitkan laporan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang belum menerbitkan atau menggunakan laporan berkelanjutan.